

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintah daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat, (Asmoko, 2012: 54).

Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersedut adalah anggaran. Mardiasmo (2009: 63) mengungkapkan bahwa anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas masyarakat. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai apa yang akan dilakukan oleh organisasi di masa yang akan datang. setiap anggaran memberikan informasi apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang, (Ulum, 2008: 98).

Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrument kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai sebuah sistem, anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan pada masyarakat, (Mardiasmo, 2009: 75). Sejak adanya perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis di era pertengahan tahun 1980-an sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang lebih fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar.

Paradigma baru yang muncul dari adanya reformasi manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan *new public manajemen*. reformasi sektor publik yang ditandai munculnya pendekatan *new public manajemen* tersebut telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik, seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, yaitu salawasitnya perubahan anggaran tradisional menjadi anggaran yang berbasis kinerja, (Mardiasmo, 2009: 83).

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Anggaran kinerja disusun untuk mengatasi kelemahan yang terdapat pada anggaran tradisional, terutama kelemahan yang didasarkan tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam

pencapai tujuan dan sasaran pelayanan publik. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem anggaran yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program, (Mahsun,dkk., 2009: 86).

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang menggunakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang telah ditetapkan dalam (PP Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Menurut Mardiasmo (2009: 122) anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran

digunakan untuk member informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Maddox (1999) dalam Asmoko (2012: 55) menjelaskan pengendalian adalah suatu proses melalui mana manajemen suatu organisasi membuat keyakinan yang beralasan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai misi dan rencana organisasi, pelaporan keuangan andal, dan kebijakan hukum dan peraturan yang relevan. Mardiasmo (2009: 46) mengelompokan tipe pengendalian menjadi tiga macam yaitu pengendalian preventif, pengendalian operasional dan pengendalian kinerja. Anthony dan young (2003) dalam Asmoko (2006: 56) menjelaskan pengendalian operasi mencakup dua aktivitas yaitu pengendalian keuangan dan pengendalian kinerja. Pengendalian keuangan berhubungan dengan aktivitas pengeluaran. Aktivitas pengendalian keuangan meliputi dua aspek yaitu untuk menjamin perencanaan yang ada didalam anggaran ditaati dan untuk menyediakan suatu cara mengubah anggaran jika kondisi mensyaratkan.

Pengendalian keuangan dapat dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil menurut anggaran dengan hasil yang sebenarnya (*actual results*), untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncanakan dapat tercapai. Proses pengendalian keuangan memastikan bahwa unit kerja sedang mencapai apa yang telah ditetapkan. Proses pengendalian keuangan membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-

hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan, (Dewi, 2011: 5).

Suatu pengendalian dapat berjalan efektif apabila semua pihak atau unsure dalam organisasi mulai dari tingkat tertinggi hingga terendah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009: 64) yang menyatakan bahwa “sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelajaran yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Pengendalian Keuangan seringkali dibatasi oleh adanya keterbatasan manusia dalam pengambilan keputusan. Suatu keputusan diambil oleh manajemen pada umumnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang ada pada saat itu, antara lain informasi yang tersedia, keterbatasan waktu dan beberapa variabel lain baik internal maupun eksternal (lingkungan). Dalam kenyataannya, sering dijumpai bahwa beberapa keputusan yang diambil secara demikian memberikan hasil yang kurang efektif dibandingkan dengan apa yang diharapkan. Keterbatasan ini merupakan keterbatasan alamiah yang dihadapi oleh manajemen.

Sistem pengendalian sangat penting dalam menunjang perbaikan pengelolaan pemerintah daerah dan merupakan faktor pendukung untuk menciptakan pemerintah yang akuntabel dan transparan sebagai cerminan dari kinerja yang baik. Dari ikhtisar hasil pemeriksaan semester I (IHPS) Tahun 2013, pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah Gorontalo semua LKPD memperoleh opini WDP (Wajar dengan pengecualian)

Berdasarkan data dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2013 oleh Badan Pemeriksa Keuangan bahwa Pemerintah Gorontalo memiliki efektivitas pengendalian intern yang memadai. Namun demikian bukan berarti Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo bebas dari kelemahan pengendalian intern, berdasarkan temuan BPK (dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1) masih ditemukan kelemahan sistem pengendalian intern pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, dimana terdapat 3 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern.

Kasus kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yaitu perencanaan kegiatan tidak memadai, mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan daerah dan hibah tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu dan ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja, pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD, dan hilangnya potensi penerimaan dan peningkatan biaya atau belanja. Sedangkan pada kasus kelemahan struktur pengendalian intern yaitu SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati, satuan pengawas intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal, dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.

Selain ditemukan kasus ketidakpatuhan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo terhadap ketentuan Undang-Undang yang mengakibatkan kerugian daerah, kekurangan penerimaan, kasus administrasi, dan

ketidakefektifan. Dalam kasus kerugian daerah yaitu belanja atau pengadaan barang/jas yang fiktif, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan barang, pembayaran honorarium biaya perjalanan dinas ganda dan atau melebihi standar yang telah ditetapkan (IHPS semester 1 tahun 2013).

Kasus kekurangan penerimaan yaitu penerimaan negara atau denda pembayaran keterlambatan pekerjaan belum disetor ke kas daerah, dana perimbangan yang telah ditetapkan belum masuk ke kas daerah. Kasus pada administrasi yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel, proses pengadaan barang atau jasa tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan undang-undang bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah. Dalam kasus ketidakefektifan yaitu penggunaan anggaran tidak tepat sasaran, dan pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Maka dengan berbagai temuan tersebut Dinas Penandapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo harus lebih memperhatikan masalah anggaran berbasis kinerja dan pengendalian yang ada pada pemerintah Kabupaten Gorontalo. terkait dengan anggaran berbasis kinerja yang seharusnya merupakan sistem anggaran yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja (ekonomi, efisiensi, dan efektivitas) namun berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2013 masih ditemukan adanya ketidakpatuhan perundang-undangan yang mengakibatkan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan.

Berbagai penelitian tentang anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian keuangan telah banyak dilakukan, penelitian tersebut diantaranya,

Penelitian Hindri Asmoko (2006) tentang pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen) hasil penelitiannya Penelitian tersebut mengatakan variabel PBK berkorelasi positif dengan variabel Pengendalian Keuangan dan variabel PBK berkorelasi positif dengan variabel efektivitas pengendalian kinerja sebesar. Rahmatullah (2009) Penelitian tersebut mengatakan terdapat pengaruh positif antara Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi secara simultan terhadap Pengendalian Keuangan, Penelitian dari Mohamad Aqoma (2011) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan pengendalian operasional berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian keuangan.

Berdasarkan uraian di atas dan ditunjang dengan teori-teori serta berbagai penelitian yang ada maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengendalian Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo (Studi Di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka penulis mengemukakan rumusan masalah yaitu apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berpengaruh terhadap Pengendalian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah Mengetahui apakah Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja berbebgaruh terhadap Pengendalian Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini sendiri merupakan salah satu cara untuk mempertajam analisis terhadap fenomena yang dikaitkan dengan teori yang ada. Penulis berharap penelitian ini memiliki Manfaat secara teoritis sebagai berikut:

1. Dapat bermanfaat bagi pengembangan teori untuk bidang ilmu akuntansi. Baik untuk akuntansi pemerintahan ataupun untuk akuntansi perilaku sendiri yang dewasa ini menjadi topik khusus bidangan akuntansi yang sedang gencar untuk dikembangkan.
2. Dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan berbagai teori yang telah dipelajari, melengkapi temuan-temuan empiris serta menambah wawasan tentang Anggaran Berbasis Kinerja dan bagaimna pengaruhnya terhadap Pengendalian Keuangan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun penelitian ini diharapkan memiliki Manfaat secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan gambaran serta penerapan teori tentang anggaran berbasis kinerja dan pengendalian keuangan pada sektor publik.

2. Bagi Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo, hasil penelitian ini dapat menghimpun informasi sebagai sumbangan pemikiran untuk dijadikan referensi serta masukan guna meningkatkan Pengendalian Keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan di bidang akuntansi sektor publik terutama dalam bahasan tentang Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Pengendalian Keuangan, serta dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian dan bahan kepustakaan atau sumber pengetahuan wawasan dengan masyarakat luas pada umumnya.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

Menurut Mulyadi (2009: 488), anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu satu tahun. Menurut Mardiasmo (2009: 61), anggaran merupakan pernyataan dari estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.

Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam suatu moneter. Pengertian anggaran sektor publik menurut Mardiasmo (2009: 62) adalah rencana kegiatan dalam bentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa ada dua hal yang harus ada pada suatu rencana dalam hal ini dalam anggaran publik yaitu adanya estimasi-estimasi:

1. Perolehan pendapatan

Pada bagian ini hendaknya anggaran yang baik dapat mencantumkan sumber dana yang dipakai. Karena sektor publik berbeda dengan sektor swasta dimana

sumber dana sektor publik biasanya berasal dari sumber-sumber dana publik dan dana ini harus dikelola dengan baik dan penuh dengan transparansi.

2. Belanja

Maksud dari belanja ini yaitu estimasi jumlah biaya-biaya yang akan dipakai. Dalam hal ini anggaran sebagai dasar perencanaan hendaknya mencantumkan akan dipakai apa sumber dana tersebut dengan pertimbangan dapat mendatangkan dampak positif bagi publik.

Indra Bastian (2009: 163) mengungkapkan anggaran sektor publik dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam satu atau beberapa periode mendatang. Fungsi anggaran sektor publik seperti yang diungkapkan oleh Indra Bastian (2009: 164) adalah sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan kinerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan di masa mendatang.
3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan.
4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja.
5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi.
6. Anggaran merupakan instrumen politik.
7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan untuk menetapkan kehendak pemerintah, sebagai alat pengendalian yang efektif, dan sebagai alat evaluasi dari setiap pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

2.1.2 Anggaran Berbasis Kinerja

Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan. Reformasi keuangan daerah secara langsung juga akan berdampak pada perlunya dilakukan anggaran daerah (APBD). Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam era otonomi daerah disusun dengan pendekatan kinerja.

Indra Bastian (2009:171) mengemukakan bahwa *performance budgeting* adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada “output” organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi, misi dan rencana strategis organisasi. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Anggaran kinerja yang efektif lebih dari sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan outcome yang telah diantisipasi. Hal ini akan menjelaskan hubungan biaya (Rp) dengan hasil (result). Indra Bastian (2002:165) mengemukakan tentang fungsi anggaran sebagai alat pengendalian ”bahwa anggaran digunakan sebagai alat pengendalian yang efektif, sehingga harus

dilakukan secara melekat (*built in control*) dalam tubuh organisasi atas berlangsungnya pelaksanaan kegiatan.

Mardiasmo (2009: 84) mengemukakan sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem anggaran yang mencakup tujuan dan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Bappenas (2007) mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entry*).

Dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja diharapkan rencana dan program-program pembangunan yang disusun dapat mengarah kepada:

1. Terwujudnya sasaran yang telah ditetapkan
2. Dicapainya hasil yang optimal dari setiap investasi yang dilakukan guna meningkatkan kualitas pelayanan public.
3. Tercapainya efisiensi serta peningkatan produktivitas di dalam pengelolaan sumberdaya dan peningkatan kualitas produk serta jasa untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan dan kemandirian nasional
4. Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, penganggaran daerah telah disusun dengan pendekatan kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk

mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula pada penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis, (Dewi, 2011: 45). Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep *value for money* atau pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematis dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplimentasikan hal-hal tersebut anggaran berbasis kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analisis, (Mardiasmo, 2009: 84)

Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (*over spending*). Menurut pendekatan anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan *internal cost awareness*, audit

keuangan, audit kinerja serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja. Selain anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan asistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut, (Mardiasmo, 2002: 75)

Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hatry, 1999 dalam Asmoko (2006: 54) mengungkapkan anggaran berbasis kinerja dapat dikatakan merupakan hal baru karena pusat perhatian diarahkan pada *outcome* dan mencoba untuk menghubungkan alokasi sumber daya secara eksplisit dengan *outcome* yang ingin dicapai.

Terdapat beberapa karakteristik penyusunan anggaran yang didasarkan pada kinerja. (Hindri Asmoko, 2006: 54) menjelaskan beberapa karakteristik kunci dalam ABK diantaranya:

1. Pengeluaran anggaran didasarkan pada outcome yang ingin dicapai;
2. Adanya hubungan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*) dan *outcome* yang diinginkan;
3. Adanya peranan indikator efisiensi dalam proses penyusunan anggaran;
4. Adanya penyusunan target kinerja dalam anggaran.

Program pada anggaran berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam menyusun anggaran berbasis kinerja, organisasi atau unit organisasi tidak hanya diwajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan dan jenis belanja tetapi juga merencanakan kinerja yang ingin dicapai. Kinerja tersebut antara lain dalam bentuk keluaran (*output*) dari kegiatan yang akan dilaksanakan dan hasil (*outcome*) dari program yang telah ditetapkan. Secara kronologis dalam proses penganggaran berdasarkan kinerja justru rencana kerja atau perencanaan kinerja harus dilakukan lebih dahulu, baru kemudian dihitung pendanaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan keluaran atau hasil yang ditargetkan sesuai rencana kinerja. Anggaran diusulkan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun.

Maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa anggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang mencerminkan penggunaan sumber daya dengan jumlah terbatas (*input*) yang dialokasikan berdasarkan hasil kerja yang ingin dicapai

dalam rencana kinerja tahunan (*outcome*). Sedangkan Indra Bastian (2009: 172) mengungkapkan beberapa ciri pokok tentang sistem penganggaran berbasis kinerja, yaitu:

1. Secara umum sistem ini mengandung tiga unsur pokok, yaitu: Pengeluaran pemerintah diklasifikasikan menurut program dan kegiatan, *Performance Measurement* (Pengukuran hasil kerja) dan *Program Reporting* (Pelaporan Program).
2. Titik perhatian lebih ditekankan pada pengukuran hasil kerja, bukan pada pengawasan.
3. Setiap kegiatan harus dilihat dari sisi efisiensi dan memaksimalkan output.
4. Bertujuan untuk menghasilkan informasi biaya dan hasil kerja yang dapat digunakan untuk penyusunan target dan evaluasi pelaksanaan kerja.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan dari sistem penganggaran yang berorientasi pada kinerja ini sangat bertolak belakang dengan sistem *traditional budgeting* yang banyak diterapkan pada negara-negara dengan sistem administrasi publik tradisional. Sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* dan memakasi *output measurement*, membutuhkan indikator-indikator keberhasilan dan penerapan *performance management*, secara luas dalam organisasi.

Mahmudi (2010: 61) mengatakan bahwa proses perencanaan dan pengendalian anggaran didahului dengan tujuan (*objective*) oleh manajemen puncak dan penetapan strategi untuk mencapainya. Tujuan merupakan hasil yang diinginkan untuk dicapai, sedangkan strategi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun proses pengelolaan keuangan daerah terdiri dari beberapa tahap,

yaitu perumusan strategi, perencanaan strategic, pembuatan program, penganggaran, implementasi, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, umpan balik yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perumusan strategi

Tahap perumusan strategi merupakan tahap penting dalam proses pengendalian organisasi, karena kesalahan dalam merumuskan strategi akan berakibat kesalahan arah organisasi. Penentuan arah dan dasar tujuan dasar organisasi merupakan bentuk perumusan strategi. Dalam perumusan strategi, organisasi merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi. Perumusan strategi merupakan kegiatan untuk merancang atau menciptakan masa depan (*creating the future*).

2. Perencanaan strategik

Setelah tahap perumusan strategi adalah perencanaan strategik. Hasil dari perumusan strategi berupa visi, misi, tujuan, nilai dasar, serta strategi harus diimplementasikan dalam bentuk program-program yang konkrit. Produk perencanaan strategik tersebut adalah berupa rencana-rencana strategik (*strategic plans*), sasaran strategik, inisiatif strategik, dan target. Rencana strategik merupakan hasil penerjemahan misi, visi, tujuan, nilai dasar, dan strategi ke dalam rencana organisasi. Sasaran strategik merupakan hasil penerjemahan strategi ke dalam sasaran-sasaran yang hendak dicapai organisasi dalam rangka mewujudkan misi, visi, dan tujuan organisasi. Target merupakan tonggak-tonggak (*milestone*) yang digunakan untuk mengetahui tingkat pencapaian strategi.

3. Pembuatan program

Tahap pembuatan program merupakan tahap yang dilakukan setelah perencanaan strategik. Rencana-rencana strategik, sasaran-sasaran strategik, dan inisiatif strategik merupakan konseptual yang harus dijabarkan dalam bentuk program-program. Program merupakan rencana kegiatan dan aktivitas yang dipilih untuk mewujudkan sasaran strategik tertentu beserta sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakannya.

4. Penganggaran

Tahap berikutnya adalah penganggaran. Program-program yang telah ditetapkan harus dikaitkan dengan biaya. Biaya program tersebut merupakan gabungan dari biaya aktivitas untuk melaksanakan program. Secara agregatif biaya seluruh program tersebut akan diringkas dalam bentuk anggaran.

5. Implementasi

Setelah anggaran ditetapkan, selanjutnya adalah implementasi anggaran. Selama tahap implementasi, pimpinan instansi bertanggungjawab untuk memonitor pelaksanaan kegiatan dan bagian akuntansi melakukan pencatatan atas penggunaan anggaran (input) dan output-nya dalam sistem akuntansi keuangan.

6. Pelaporan Kinerja

Tahap implementasi, bagian akuntansi melakukan proses pencatatan, penganalisisan, pengklasifikasian, peringkasan, dan pelaporan transaksi atau kejadian ekonomi berkaitan dengan keuangan. Informasi akuntansi tersebut akan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut

merupakan salah satu bentuk pelaporan kinerja sektor publik, terutama kinerja finansial. Pelaporan kinerja keuangan yang dihasilkan dari sistem informasi akuntansi harus dilengkapi dengan informasi mengenai kinerja nonkeuangan.

7. Evaluasi Kinerja

Pelaporan kinerja organisasi harus memiliki dua manfaat utama yaitu bagi pihak internal dan eksternal. Bagi pihak internal laporan kinerja digunakan sebagai alat pengendalian manajemen untuk menilai kinerja manajer dan staf. Bagi pihak eksternal laporan kinerja berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban organisasi.

8. Umpan balik (*Feedback*)

tahap terakhir setelah dilakukan evaluasi kinerja adalah pemberian umpan balik (*feedback*). Tahap ini dilakukan sebagai sarana untuk melakukan tindak lanjut (*follow up*) atas prestasi yang dicapai. Apabila berdasarkan penilaian kinerja dinyatakan dalam organisasi belum mencapai misi, visi, dan tujuan organisasi yang ditetapkan, maka kemungkinan perlu dilakukan penetapan ulang atas perumusan strategi organisasi.

2.1.3 Pengendalian Keuangan

Setiap organisasi termasuk juga organisasi Pemerintah Daerah memiliki tujuan yang hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi Pemerintah Daerah tersebut diperlukan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program-program atau aktivitas. Organisasi Pemerintah Daerah dapat dianggap sebagai suatu pusat pertanggungjawaban dimana Kepala Daerah menjadi pimpinan pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban tersebut dapat dipecah-pecah

menjadi pusat pusat pertanggungjawaban yang lebih kecil hingga level pelayanan atau program, sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Pusat-pusat pertanggungjawaban tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk perencanaan dan pengendalian anggaran, serta penilaian kinerja atas unit kerja yang dipimpinnya. Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan anggaran (*Budget Holder*) bertanggungjawab untuk melaksanakan APBD. APBD mencerminkan nilai rupiah dari input yang dialokasikan ke pusat pusat pertanggungjawaban (SKPD) dan output yang diharapkan atau level aktivitas yang dihasilkan.

Dalam penelitian dari Rahmatullah (2010) mendefinisikan berbagai pengertian pengendalian menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Anthony, et.al., dalam Dewi S. Satiyo (2004: 48) pengendalian yaitu proses yang digunakan untuk melakukan hal pengendalian strategi yang tujuannya adalah memastikan bahwa strategi yang digunakan sudah tepat dan pengendalian organisasi yang tujuannya adalah memastikan bahwa para anggota organisasi melakukan yang dikehendaki organisasinya.
2. Definisi Robert J. Mockler (Stoner, 1994: 241) mengenai pengendalian menunjukkan elemen esensial dari proses pengendalian adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan untuk mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk

memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan. Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengendalian adalah proses yang digunakan untuk melakukan hal pengendalian strategi, sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai, proses untuk menjamin terciptanya kinerja yang efektif yang memungkinkan tercapainya tujuan perusahaan.

3. Menurut Robbins, et al. (1999: 526). Pengendalian adalah proses memantau kegiatan-kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Untuk mengarahkan beberapa variabel tersebut dalam suatu organisasi bukanlah suatu pekerjaan yang mudah apalagi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Sehingga dikatakan lebih lanjut bahwa manajemen harus menjaga agar organisasi tetap terkendali, sehingga organisasi ini akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan.
4. Definisi Robert J. Mockler (Stoner:1994: 241) mengenai pengendalian menunjukkan elemen esensial dari proses pengendalian. Pengendalian adalah usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi kerja dengan tujuan perencanaan, untuk mendesain sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah ditetapkan terlebih dahulu, untuk menetapkan apakah ada deviasi dan untuk mengukur signifikansinya, serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan perusahaan.

Salah satu alasan pengendalian diperlukan adalah rencana yang paling baik sekalipun dapat menyimpang. Tetapi pengendalian juga membantu manajer memonitor perubahan lingkungan dan pengaruhnya pada kemajuan organisasi. Dalam hal ini pengendalian di fokuskan kepada pengendalian keuangan, yaitu fungsi utama informasi akuntansi. Informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Informasi akuntansi umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Menurut Mardiasmo (2009: 35) membedakan akuntansi sebagai alat pengendalian menjadi dua yaitu:

1. Pengendalian keuangan yakni terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi.
2. Pengendalian organisasi yakni terkait dengan pengintegrasikan aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan.

Selanjutnya menurut Nora Hilmia (2010) mengungkapkan bahwa pengendalian adalah suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Fokus utama dalam pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang dalam organisasi bukan mesin. Tahapan dalam proses pengendalian terpadu ada tiga, yaitu:

1. Perencanaan: adanya penetapan tujuan mengenai dasar organisasi dan komunikasi

2. Umpan balik: pentingnya perencanaan dalam organisasi, sehingga bagaimana manajemen membuat perencanaan yang memiliki *feedback value* dipertaruhkan disini.
3. Interaksi pengendalian: menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan dari umpan balik

Masalah pengendalian erat hubungannya dengan peran para eksekutif keuangan atau controller, bahkan ada yang menyebut mereka sebagai generator of control. Julukan ini sangat beralasan karena pengendalian keuangan mencerminkan pengendalian atas seluruh aktivitas bisnis yang diukur dengan satuan moneter. Ukuran-ukuran moneter ini memang bersifat formal sebagaimana tampak dalam anggaran perusahaan yang merupakan perwujudan dari rencana-rencana, (Anthony, et.al., 1984) dalam Dewi (2011).

Stoner mengemukakan (1994: 252) pengendalian keuangan memiliki suatu keunggulan dalam metode pengendalian, karena uang mudah diukur dan dihitung. Laporan keuangan salah satunya yang memberikan pemahaman akan kinerja, kesehatan dan peluang jangka panjang organisasi, untuk tetap hidup. Selanjutnya menelaah metode pengendalian anggaran, yang membantu manajer mengendali sumber keuangan organisasi. Iwan (2006: 69) dalam Dewi (2011) menyebutkan pengendalian keuangan merupakan pengendalian yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan, pengeluaran, biaya-biaya termasuk pengendalian anggaran.

Fred, (1990: 362) *Financial control moves on to the implementation phase, dealing with the feedback and adjustment process that is required (1) to*

assure that plans are followed or (2) to modify existing plans in response to changes in the operating environment. (Pengendalian keuangan merujuk pada fase pelaksanaan, berhubungan dengan umpan balik dan proses penyesuaian yang dibutuhkan (1) untuk menyakinkan rencana-rencana yang diikuti (2) untuk memodifikasi rencana-rencana yang ada dalam respon pada perubahan-perubahan pelaksanaan sebuah lingkungan).

Menurut Porter (1987: 148), *Accounting control comprises the plan of organization and the procedures and record that are concerned with the safeguarding of assets and the reliability of financial records.* (Pengendalian keuangan merupakan perencanaan suatu organisasi dan prosedur dan mengukur hal-hal yang diperhatikan keamanan asset dan pertanggungjawaban laporan keuangan).

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan pengendalian keuangan merupakan mengendalikan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meliputi aspek efisiensi dan efektivitas anggaran dalam hal ini faktor penentu dalam pengendalian keuangan yaitu laporan keuangan. Seperti disebutkan oleh Mardiasmo (2009:160) dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi, sedangkan dari sisi pemakai eksternal laporan keuangan merupakan salah satu bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Pengendalian keuangan tidak luput dari pengukuran-pengukuran yang dilakukan oleh manajemen untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan suatu

organisasi dalam mengelola anggaran yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya. Menurut Mahsun (2006: 131) pendekatan-pendekatan pengukuran kinerja organisasi sektor publik dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Anggaran. Adalah pengukuran kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dengan realisasinya.
2. Analisis Rasio Laporan Keuangan. Adalah pengukuran kinerja didasarkan atas perhitungan rasio-rasio keuangan.
3. *Balanced Scorecard Method*. Adalah pengukuran kinerja dengan berbasis pada aspek finansial dan non finansial.
4. *Performance Audit* (Pengukuran *Value for Money*). Adalah Pengukuran dan pemeriksaan kinerja dengan berdasarkan pada ukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengendalian keuangan adalah pencapaian hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya yakni anggaran yang dapat dikendalikan untuk memenuhi faktor efisiensi dan efektivitas dari pengukuran-pengukuran kinerja keuangan.

Dari definisi-definisi di atas dapat disimpulkan pengendalian keuangan merupakan mengendalikan anggaran untuk mencapai tujuan organisasi yaitu meliputi aspek efisiensi dan efektivitas anggaran dalam hal ini faktor penentu dalam pengendalian keuangan yaitu laporan keuangan.

2.1.4 Keterkaitan Antara Penerapan Anggaran berbasis kinerja dengan Pengendalian Keuangan

Pendekatan anggaran kinerja adalah suatu sistem anggaran yang menggunakan upaya pencapaian hasil kerja (*output*) dari perencanaan alokasi biaya (*input*) yang telah ditetapkan dalam (PP Nomor 105 Tahun 2000, Pasal 8). Kinerja mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik dan harus berpihak pada kepentingan publik, yang artinya memaksimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Menurut Mardiasmo (2009: 122) anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan) eksekutif.

Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk member informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Penganggaran berbasis kinerja menghubungkan pengeluaran anggaran dengan hasil yang akan dicapai (Kenis dalam Mardiasmo, 2004). Sedangkan Anthony dan Young (2003) menjelaskan pengendalian keuangan berhubungan dengan aktivitas pengeluaran. Sistem pengendalian keuangan dirancang untuk menjamin bahwa langkah yang benar telah dilakukan, dan catatan khusus dilakukan, untuk menjaga integritas keuangan dari aktivitas organisasi. Aktivitas pengendalian keuangan meliputi dua aspek yaitu untuk menyediakan suatu cara untuk mengubah anggaran jika kondisinya mensyaratkan.

Pengendalian keuangan dapat dilaksanakan dengan membandingkan antara hasil menurut anggaran dengan hasil yang sebenarnya (*actual results*), untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak dilampaui dan tingkat aktivitas yang direncanakan dapat tercapai. Proses pengendalian keuangan memastikan bahwa unit kerja sedang mencapai apa yang telah ditetapkan. Proses pengendalian keuangan membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan, (Dewi, 2011: 5).

Pencapaian target anggaran memainkan peranan penting karena anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi. Anggaran menggambarkan standar efektivitas karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan dan standar efisiensi karena anggaran merinci masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dengan demikian, efektivitas pengendalian keuangan

dalam penganggaran adalah dicapainya realisasi pengeluaran anggaran yang sesuai dengan rencananya.

Berbagai penelitian tentang anggaran berbasis kinerja dan efektifitas pengendalian keuangan telah banyak dilakukan, penelitian tersebut diantaranya, Penelitian Hindri Asmoko (2006) tentang pengaruh penganggaran berbasis kinerja terhadap efektifitas pengendalian (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen) hasil penelitiannya Penelitian tersebut mengatakan variabel PBK berkorelasi positif dengan variabel Pengendalian Keuangan dan variabel PBK berkorelasi positif dengan variabel efektifitas pengendalian kinerja sebesar. Rahmatullah (2009) Penelitian tersebut mengatakan terdapat pengaruh positif antara Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi secara simultan terhadap Pengendalian Keuangan, Penelitian dari Mohamad Aqoma (2011) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan pengendalian operasional berpengaruh positif terhadap efektifitas pengendalian keuangan.

2.2 Penelitian Terdahulu.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 2.1 berikut:

Nama	Judul	Indikator	Kesimpulan
Hindri Asmoko (2006)	Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Pengendalian (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen)	ABK, pengendalian intern	Penelitian tersebut mengatakan variabel PBK berkorelasi positif dengan variabel pengendalian keuangan sebesar 30,8% dan variabel PBK berkorelasi positif dengan variabel pengendalian kinerja sebesar 41,3%.
Rahmatullah (2009)	Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Pengendalian Keuangan (Survei Pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bogor)	Penganggaran berbasis kinerja, kompetensi dan pengendalian keuangan	Penelitian tersebut mengatakan terdapat pengaruh positif antara Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi secara simultan terhadap Pengendalian Keuangan sebesar 49,20%.
Mohamad Aqoma (2011)	Analisis penerapan anggaran berbasis kinerja dan pengendalian operasional terhadap efektivitas pengendalian keuangan.	penerapan anggaran berbasis kinerja, pengendalian operasional, efektivitas pengendalian keuangan.	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan pengendalian operasional berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian keuangan.
Agustini (2009)	pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap pengendalian pada dinas pendidikan kabupaten sukabumi	Anggaran Berbasis Kinerja dan pengendalian	Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pelaksanaan anggaran berbasis kinerja pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sudah dapat diterapkan dengan baik dan pengendalian pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sudah berjalan baik serta dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja berpengaruh secara signifikan terhadap pengendalian

2.2 Kerangka Pemikiran

Terselenggaranya Otonomi Daerah di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan kesejahteraan, pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, dan keadilan dengan adanya keterbukaan dan kemandirian (desentralisasi) serta efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan pada semua elemen pemerintah.

Reformasi sektor publik yang disertai adanya tuntutan demokratisasi menjadi suatu fenomena global di Indonesia. Tuntutan demokratisasi ini

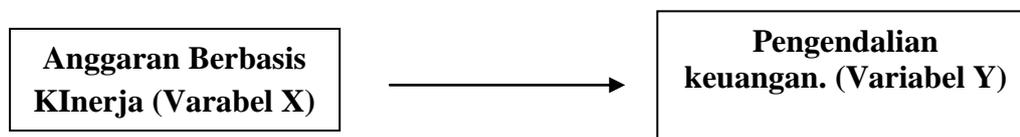
menyebabkan aspek transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan negara. Menurut Mardiasmo (2009:20) mengemukakan bahwa :Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengemukakan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah adalah anggaran. Menurut Mardiasmo (2009:61) mengatakan Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sejalan dengan pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lahir pula UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang diundangkan tanggal 5 April 2003. Aturan dimulai dari penetapan prosedur penyusunan anggaran (APBN dan APBD) dan dilanjutkan dengan substansi penganggaran baik ditingkat pusat (APBN) maupun ditingkat daerah (APBD). Undang-undang ini menginginkan kesamaan penganggaran Pemerintah dan penganggaran daerah, aturan ini menerapkan secara penuh anggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*), agar penggunaan anggaran tersebut bisa dinilai kemanfaatan dan kegunaannya bagi masyarakat. Saat ini pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah mengacu kepada

Penganggaran berbasis kinerja merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan keterkaitan antara pendanaan dengan hasil dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Untuk itu melalui reformasi anggaran, yaitu pemberlakuan anggaran berbasis kinerja yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29/2002 pasal 17 ayat 2 dan undang-undang nomor 17/2003 diharapkan terjadi perubahan dalam pengaturan dan pengelolaan daerah, Pemerintah Daerah diharuskan menyusun anggaran dengan mengacu kepla indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Diungkapkan oleh (Kamaroesid, 2008:31) bahwa sistem ini terutama berusaha untuk menghubungkan antara keluaran (*output*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi terhadap anggaran yang dialokasikan. Pencapaian target anggaran memainkan peranan penting karena anggaran menggambarkan standar efektivitas dan efisiensi. Anggaran menggambarkan standar efektivitas karena memuat suatu set keluaran yang diinginkan dan standar efisiensi karena anggaran merinci masukan yang diperlukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dengan demikian, pengendalian keuangan dalam penganggaran adalah dicapainya realisasi pengeluaran anggaran yang sesuai dengan rencananya. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan teori-teori yang ada diatas, adanya pengaruh dari penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap pengendalian keuangan yang mempengaruhi pada hasil laporan keuangan, karena maksud dari adanya anggaran berbasis kinerja ini adalah agar keuangan pemerintah dapat terkendali dengan baik dan menghindari adanya penyelewengan. Ini ditunjang pula dengan penelitian

yang sudah ada sebelumnya oleh Hindri Asmoko (2006) yang menyatakan bahwa hasil pengujian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis kinerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengendalian keuangan. Penelitian tersebut dilakukan pada Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sragen tahun 2006. Hasil penelitian selanjutnya (Rahmatullah : 2009) menyatakan adanya pengaruh yang signifikan antara penganggaran berbasis kinerja terhadap pengendalian keuangan. Penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Bogor tahun 2009. Dengan demikian dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan teori yang mendukung maka dapat disimpulkan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap pengendalian keuangan.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Sugiyono (2009: 93) mengemukakan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis yang penulis ajukan untuk penelitian ini adalah diduga penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap pengendalian keuangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPPKAD (Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Gorontalo, DPPKAD merupakan badan yang mengelola seluruh keuangan daerah. Obyek ini didasarkan atas pertimbangan lokasi tersebut memenuhi syarat terutama dalam hubungan dengan pengumpulan data penelitian, serta memperhatikan segi biaya, waktu dan tenaga.

3.2 Desain Penelitian

Penelitian merupakan suatu cara yang dapat dilakukan untuk menemukan suatu jawaban, untuk membuktikan sesuatu hal atau untuk memecahkan suatu masalah. Dalam suatu penelitian digunakan metode tertentu yang dapat membantu agar tujuan penelitian tersebut tercapai.

Menurut M. Nazir (2009: 84) "Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian". Sehingga dapat dikatakan bahwa desain penelitian diperlukan untuk melakukan penelitian mulai dari tahap awal berupa merumuskan masalah hingga sampai pada tahap pelaporan hasil penelitian. Husein Umar (2008:4) menyatakan bahwa desain penelitian merupakan suatu cetak biru (*blue print*) dalam hal bagaimana data dikumpulkan, diukur, dan dianalisis. Desain penelitian adalah suatu rencana kerja yang terstruktur dalam hal hubungan-hubungan antarvariabel secara komprehensif,

sedemikian rupa agar hasil penelitiannya dapat memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian. Rencana tersebut mencakup hal-hal yang akan dilakukan penelitian mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada analisis akhir.

Pada penelitian ini, desain yang digunakan adalah hubungan variabel yang bersifat kasual. Karena penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana hubungandan pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Seperti yang diungkapkan oleh Husein Umar (2008:8) bahwa desain kausal berguna untuk mengukur hubungan-hubungan antarvariabel penelitian atau berguna untuk menganalisis bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain. Sehubungan dengan jenis penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode survei. Adapun ciri-ciri dari metode survei adalah tujuannya bersifat deskriptif dan juga verifikatif, data dikumpulkan dari sampel yang telah ditentukan, data variabel penelitian dijaring dengan menggunakan alat pengumpulan data tertentu, yaitu kuesioner.

Metode *survei* yang digunakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dilakukan melalui penelitian lapangan, yakni dengan menyebarkan kuisisioner dan wawancara terstruktur apabila diperlukan terkait dengan arsip data yang dibutuhkan.

3.3 Definisi Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2009:59) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Variabel dapat dikatakan sebagai suatu hal yang menjadi objek pengamatan penelitian atau sering pula dikatakan sebagai faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Variabel Independen (X)

Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel independen (variabel terikat) ini adalah anggaran berbasis kinerja. Dadang Solihin, Bappenas (2007) mengemukakan bahwa anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (*budget entry*).

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Disini yang menjadi variabel dependen adalah efektivitas pengendalian keuangan. Indra Bastian (2009) mengungkapkan bahwa pengendalian keuangan adalah suatu inisiatif yang dipilih yang akan mengubah kemungkinan dari pencapaian hasil yang diharapkan. Fokus utama dalam

pengendalian keuangan adalah perilaku dari orang dalam organisasi bukan mesin. Tahapan dalam proses pengendalian terpadu ada tiga, yaitu:

1. Perencanaan: adanya penetapan tujuan mengenai dasar organisasi dan komunikasi.
2. Umpan balik: pentingnya perencanaan dalam organisasi, sehingga bagaimana manajemen membuat perencanaan yang memiliki feedback value dipertaruhkan disini.
3. Interaksi pengendalian: menghubungkan subsistem pengendalian dengan baik guna mendukung perencanaan dari umpan balik.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang pernah digunakan oleh Rahmatullah (2009) dan Asmoko (2006) karena instrumen tersebut telah di uji validitas dan reabilitasnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1: Tabel Definisi Operasional dan Indikator Variabe

Jenis Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Idikator	Skala
Anggaran Berbasis Kinerja (X) (Dadang Solihin, Bappenas 2007)	Anggaran berbasis kinerja (<i>Performance Based Budgeting</i>) merupakan penyusunan anggaran yang didasarkan atas perencanaan kinerja, yang terdiri dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta indikator kinerja yang ingin dicapai oleh suatu entitas anggaran (<i>budget entry</i>).	1. Anggaran disusun berdasarkan perencanaan kinerja 2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan didasarkan atas perencanaan kinerja. 3. Adanya indikator kinerja yang ingin dicapai oleh entitas anggaran. Mahmudi (2010), Dewi (2011)	1. kesesuaian antara rencana kerja dengan indikator kinerja 2. APBD disusun berpedoman pada rencana kerja 3. Mewujudkan prestasi kerja sesuai dengan perundang-undangan 1. Kegiatan pemerintah didasarkan prinsip efisiensi 2. Anggaran diarahkan untuk mengurangi pengangguran 3. Anggaran diarahkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 1. Rencana kerja memuat prestasi kerja 2. Prestasi kerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator, tolok ukur kinerja dan target kegiatan	Ordinal
Efektivitas Pengendalian Keuangan (Y)	Pengendalian keuangan merupakan Pengendalian yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut keuangan, tentang pemasukan, pengeluaran, biaya-biaya termasuk pengendalian anggaran.	1. Pengendalian Personalia 2. Pengendalian Sistem. 3. Pengendalian Sumber/Pemakai 4. Pengendalian Pengolahan (<i>Processing Control</i>) Asmoko (2006), Dewi (2011)	1. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban APBD 2. Memilih SDM atau personil pengelolaan keuangan sesuai dengan bidangnya. 3. Memiliki struktur organisasi yang jelas 4. Program kerja mempunyai hasil yang terukur 5. Program kerja disusun sesuai target 6. Mengetahui adanya penerbitan surat-surat terkait dengan pengeluaran anggaran 7. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD 8. Validasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan mendapatkan pengesahan oleh pejabat berwenang 9. Pejabat mengesahkan dokumen terkait dengan surat bukti atas pelaksanaan APBD	Ordinal

Berdasarkan tabel operasional di atas, maka pengukuran dan skala yang digunakan untuk pembuatan item kuisisioner adalah menggunakan skala likert dimana berisi pernyataan yang sistematis untuk menunjukkan sikap seseorang terhadap pernyataan itu. Sedangkan menurut Sugiyono (2011:93) bahwa skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau

sekelompok orang tentang fenomena sosial yang ditetapkan oleh peneliti sebagai variabel penelitian.

Adapun yang dipakai sebagai kuisisioner atas angket dengan menggunakan (lima) pilihan yaitu sangat setuju (A), setuju (B), ragu-ragu (C), tidak setuju (D), dan Sangat tidak setuju (E) setiap pilihan akan diberikan skor/bobot nilai yang berbeda seperti tampak pada tabel 3 berikut ini:

Tabel 3.2: Pernyataan dengan skala likert

Pilihan	Skor/Bobot	Keterangan
A	5	Sangat setuju
B	4	Setuju
C	3	Ragu-ragu
D	2	Tidak setuju
E	1	Sangat tidak setuju

3.4 Populasi dan sampel penelitian

Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin hasil menghitung atau pengukuran kuantitatif atau kualitatif dan karakteristik tertentu atau sekumpulan objek yang lengkap dan jelas sifatnya. Menurut Sugiono (2009) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Dengan demikian populasi merupakan sumber suatu penyimpulan atas suatu fenomena. Karena penelitian ini dilakukan pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo, maka populasi sasaran yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian sebanyak 73 pegawai/responden.

Metode pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, teknik penentuan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu (Sugiyono, 2009:68). Adapun pertimbangan yang ditentukan oleh penulis dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut:

1. Merupakan staf/pegawai yang bertanggung jawab langsung atas penyusunan laporan keuangan
2. Staf/pegawai yang ada dibagian anggaran

Adapun yang terpilih menjadi sampel penelitian berdasarkan pertimbangan yang ditentukan oleh penulis adalah sebanyak 48 pegawai/responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan (*questionnaire*) yang diantar langsung ke responden, kemudian kuisisioner tersebut dikumpul kembali setelah batas waktu yang ditentukan.

3.5.1 Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang langsung diperoleh dari tempat penelitian. Data ini berupa hasil kuisisioner yang telah diisi oleh responden.

3.5.2 Instrumen

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati yang secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2011: 102). Instrumen penelitian dalam penelitian ini berupa kuisisioner yang berhubungan dengan indikator Pengendalian Keuangan daerah pemerintah daerah dan Penerapan anggaran berbasis kinerja.

3.5.3 Prosedur Pengujian Instrumen

Penggunaan instrument dalam penelitian, diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliabel. Menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya maka data penelitian menjadi valid

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menilai sejauh mana suatu alat ukur diyakini dapat dipakai sebagai alat untuk mengukur item-item pertanyaan-pertanyaan kuisisioner dalam penelitian. Instrumen yang valid berarti intrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiono, 2011: 121). Teknik yang digunakan untuk mengukur validitas pertanyaan-pertanyaan kuisisioner adalah Korelasi Product Moment dari Karl Pearson dengan ketentuan: jika r hitung lebih besar dari r tabel, maka skor butir pertanyaan kuisisioner valid tetapi sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel, maka skor butir pertanyaan kuisisioner tidak valid.

Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan korelasi *product moment* (Sugiyono, 2011: 183) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$R_{xy} = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{\sum x^2 - (\sum x)^2} \sqrt{n \sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

Keterangan:

x : Skor item ke-1

y : Skor total variabel

n : Jumlah responden

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk menunjukkan sejauhmana kestabilan dan konsistensi instrumen dalam mengukur konsep. Selain itu pengujian reliabilitas dilakukan untuk membantu menetapkan kesesuaian pengukur. Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan koefisien reliabilitas *Alpha cronbach* (Arikunto, 2006: 196) yaitu:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{(k-1)} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right]$$

Keterangan:

r^{11} : Reliabilitas instrumen

k : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

$\sum \sigma_b^2$: Jumlah varians butir

σ_t^2 : Varians total

Sekumpulan pertanyaan untuk mengukur suatu variabel dikatakan reliabel dan berhasil mengukur dimensi variabel yang kita ukur jika koefisien reliabilitasnya minimal 0,5 atau 0,6.

3. Konversi data

Konversi data dilakukan apabila data dari variabel-variabel penelitian adalah data yang berskala ordinal, sedangkan syarat data untuk dapat digunakannya statistik *inferensial* (analisa regresi) sebagai analisis utama dalam

pengujian hipotesis pada penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval.

3.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linear sederhana. Penggunaan teknik ini karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel terikat (Pengendalian Keuangan daerah) dan satu variabel independen (Penerapan anggaran berbasis kinerja). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2009: 261) adalah:

$$Y = a + bX$$

Y : Variabel dependen (Pengendalian Keuangan daerah)

X : Variabel independen (Penerapan anggaran berbasis kinerja)

b : Angka arah atau koefisien regresi

a : *Intercept* atau konstanta

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum data dianalisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linear sederhana, data tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang dikehendaki dalam analisis regresi yaitu sebagai berikut:

1. Uji Normalitas

Setelah mendapatkan data mengenai variabel-variabel penelitian, data tersebut diuji kenormalannya, apakah data tersebut berdistribusi secara normal atau tidak. Jika data yang diperoleh itu tidak terdistribusi dan variansinya tidak sama, maka pengujian hipotesis dilakukan dengan alat statistik nonparametrik.

Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat grafik penyebaran data dan *kolmogorow-smirnov*. Jika tingkat signifikannya lebih besar dari 0,05, maka data itu terdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka distribusi data adalah tidak normal.

2. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk mengetahui linieritas hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping itu dengan pengujian linearitas pengujian diharapkan dapat mengetahui taraf signifikan penyimpangan dari linieritas hubungan tersebut.

2.6.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis bertujuan menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen yaitu Penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap Pengendalian Keuangan daerah Pemerintahan Kabupaten Gorontalo sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian diuji dengan menggunakan analisa regresi linear sederhana (Uji t).

Uji Parsial (Uji t)

Secara parsial hipotesis penelitian yang akan diuji dirumuskan menjadi hipotesis statistik berikut:

$H_0: \rho_{yx1} = 0$ Penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap Pengendalian Keuangan daerah.

$H_a: \rho_{yx1} \neq 0$ Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Pengendalian Keuangan daerah.

Secara individual uji statistik yang digunakan adalah uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dilakukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} . Untuk menentukan nilai t_{tabel} ditentukan dengan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan $df = (n-k)$ dimana n adalah jumlah responden dan k adalah jumlah variabel. Kriteria pengujian yang digunakan adalah:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel} (n-k)$ maka H_0 ditolak,

Jika $t_{hitung} < t_{tabel} (n-k)$ maka H_0 diterima

2.6.3 Koefisien Determinasi R^2

Untuk mengukur besarnya proporsi atau presentasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen maka dilakukan pengujian koefisien determinan. Koefisien determinan berkisar antara nol sampai dengan satu ($0 \leq R^2 \leq 1$). Hal ini berarti $R^2 = 0$ menunjukkan tidak adanya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, bila R^2 semakin besar mendekati 1, menunjukkan semakin kuatnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan bila R^2 semakin kecil mendekati nol maka dapat dikatakan semakin kecilnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum DPPKAD Kabupaten Gorontalo.

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gorontalo. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang dilatarbelakangi oleh perubahan pengelolaan keuangan daerah, yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan Realisasi APBD, Neraca daerah, Laporan arus kas dan Catatan atas laporan keuangan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organisasi BPKD yang telah dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset/barangdaerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo adalah salah satu dari Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo yang berkedudukan sebagai Dinas Daerah. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unit organisasi berada dibawah koordinasi Asisten Administrasi yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2007 dengan fungsi pokoknya yaitu mengelola administrasi keuangan daerah Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari Sekretariat dan 4 Bidang yaitu Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran dan Verifikasi, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset.

4.1.2 Gambaran Umum Responden

Adapun responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada pada bagian Keuangan pada DPPKAD kabupaten Gorontalo. Data penelitian dikumpulkan dengan menyebarkan kepada para responden, kuesioner disebar dengan cara diantar langsung kepada responden. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 48 kuesioner, dari 48 kuesioner tersebut sebanyak 40 yang kembali dan dapat digunakan untuk olah data selanjutnya sedangkan sisanya 8 tidak kembali hal ini disebabkan pada saat pengambilan kembali kuesioner ada pegawai yang tidak hadir. Adapun profil dari 40 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4 Profil Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	17	42,50%
2. Perempuan	23	57,50%
Usia		
1. < 30 tahun	10	25,00%
2. 30 – 40 tahun	16	40,00%
3. 40 – 50 tahun	9	22,50%
4. > 50 tahun	5	12,50%
Tingkat Pendidikan		
1. S2	7	17,50%
2. S1	17	42,50%
3. D3	12	30,00%
4. D1	-	0,00%
5. SMA	4	10,00%
Masa Kerja		
1. 1-2 tahun	0	0%
2. 2-4 tahun	9	22,50%
3. 4-6 tahun	18	45,00%
4. 6-10 tahun	5	12,50%
5. > 10 tahun	8	20,00%

Berdasarkan jenis kelamin responden terdiri 42.50 % laki-laki dan 57.50 % perempuan, dilihat dari usia responden dapat diketahui bahwa yang berusia kurang dari 30 tahun adalah 25 %, usia 30 sampai 40 tahun 40 %, usia 40 sampai 50 tahun 22.50 % dan yang berusia diatas 50 tahun 12.50 %. Dari tingkat pendidikan, diketahui bahwa mayoritas responden adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 42,50 %, S2 sebesar 17.50 %. Kemudian mereka yang berpendidikan SMA sebanyak 10%, D3 sebanyak 30%. Selanjutnya responden dikelompokkan berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa masa kerja lebih dari 10 tahun adalah sebanyak 20 %, yang memiliki masa kerja 6-10 tahun sebanyak 12.50%, yang memiliki masa kerja 2-4 tahun 22.50 % dan yang memiliki masa kerja 4-6 tahun sebesar 45%

4.1.3 Uji Kualitas Instrumen

Kualitas data yang dihasilkan dari penggunaan instrumen dalam penelitian ini dapat dianalisis dengan pengujian validitas dan reliabilitas. Oleh karena itu sebelu dibagikan kepada responden, terlebih dahulu kuesioner dilakukan uji validitas dan reliabilitas.

4.1.3.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana alat pengukur (kuesioner) mengukur apa yang diinginkan. Uji validitas ini dilakukan dengan mengkorelasikan antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total yang diperoleh dari penjumlahan semua skor pertanyaan. Bila korelasi tersebut signifikan, maka alat ukur yang digunakan mempunyai validitas (Sumarsono, 2002:31). Dengan taraf signifikan 5% dan jumlah responden sebanyak 40

orang, maka angka kritis dari r tabel (tabel r product moment) yang didapat adalah sebesar 0,312 jika koefisien korelasi yang diperoleh lebih besar dari r tabel maka pertanyaan tersebut valid, Nilai r tabel dapat dilihat pada Lampiran 8 pada tabel r product moment.

Adapun hasil pengujian validitas untuk masing-masing variabel dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel Anggaran Berbasis Kinerja (X)

Variabel anggaran berbasis kinerja terdiri atas 8 item pertanyaan, dengan menggunakan program SPSS 16 hasil uji validitas variabel anggaran berbasis kinerja dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5: Hasil Pengujian Validitas Variabel X
(Anggaran berbasis Kinerja)**

Item Pertanyaan	r_{hitung}	r_{tabel}	Status
1	0.797	.312	Valid
2	0.515		Valid
3	0.617		Valid
4	0.861		Valid
5	0.826		Valid
6	0.823		Valid
7	0.727		Valid
8	0.842		Valid

Sumber: Olah Data 2015

Berdasarkan status pada tabel 5 dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel anggaran berbasis kinerja valid, hal ini sebagaimana terlihat dari nilai r_{hitung} dari semua item pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} yaitu 0.312. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat

ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel anggaran berbasis kinerja

2. Variabel efektivitas pengendalian keuangan (Y)

Variabel efektivitas pengendalian keuangan dalam penelitian ini terdiri atas 9 item pernyataan, dengan menggunakan program SPSS 16 hasil uji validitas variabel efektivitas pengendalian keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6: Hasil Pengujian Validitas Variabel Y
(efektivitas pengendalian keuangan)**

Item Pertanyaan	R_{hitung}	R_{tabel}	Status
1	0.888	0.312	Valid
2	0.612		Valid
3	0.906		Valid
4	0.836		Valid
5	0.718		Valid
6	0.615		Valid
7	0.447		Valid
8	0.832		Valid
9	0.696		Valid

Sumber: Olah Data 2015

Berdasarkan status pada tabel 6 di atas dapat dikatakan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan untuk mengukur variabel efektivitas pengendalian keuangan valid, hal ini sebagaimana terlihat dari nilai r_{hitung} dari semua item pertanyaan lebih besar dari nilai r_{tabel} yang telah ditentukan yaitu 0.312. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa seluruh item pertanyaan yang digunakan tersebut telah menunjukkan tingkat ketepatan yang cukup baik dan dapat digunakan untuk mengukur variabel efektivitas pengendalian keuangan.

4.1.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dipakai dua kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukurannya relatif sama maka alat ukur tersebut reliabel. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur dalam mengukur gejala yang sama, (Azwar, 2001).

Pengambilan keputusan berdasarkan nilai *alpha Cronbach* jika nilai Alpha melebihi atau sama dengan 0,6 maka pertanyaan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya (Ghozali, 2005). Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 7 : Hasil Pengujian Reliabilitas

Variabel	Nilai Alpha	Status
Anggaran berbasis kinerja	0.781	Reliabel
Efektivitas pengendalian keuangan	0.774	Reliabel

Sumber: Olah data 2015

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa variabel anggaran berbasis kinerja dan efektivitas pengendalian keuangan memiliki status reliabel. Hal ini dikarenakan nilai *Alpha Cronbach* variabel tersebut lebih besar dari 0,6. Yang artinya instrumen yang digunakan tersebut telah menunjukkan kekonsistenan pengukuran pada semua respondennya. Kondisi ini juga memberikan arti bahwa seluruh variabel tersebut dapat digunakan pada analisis selanjutnya.

4.1.4 Transformasi Data

Data mengenai variabel-variabel penelitian melalui kuesioner adalah data ordinal, sedangkan syarat untuk dapat digunakannya statistik sebagai alat analisis utama dalam pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah sekurang-kurangnya data yang berskala interval. Sebelum dianalisis lebih lanjut, data ordinal yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner selanjutnya dijadikan data interval melalui *method successive interval* (MSI). Hasil MSI untuk setiap item pertanyaan dalam setiap variabel dapat dilihat dalam lampiran.

4.1.5 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum data di analisis lebih lanjut menggunakan analisis regresi linier sederhana, data tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang dikehendaki dalam analisis regresi yaitu sebagai berikut:

4.1.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normal tidaknya distribusi variabel dalam penelitian ini dilakukan dengan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S test). Jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* signifikan pada taraf di atas 5% (0,05), maka data mengikuti distribusi normal, dan sebaliknya jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* signifikan pada taraf 5% atau dibawahnya berarti data

mengikuti distribusi tidak normal. Hasil uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8.: Hasil Pengujian Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Anggaran berbasis kinerja	Efektivitas pengendalian keuangan
N			40	40
Normal Parameters ^a	Mean		18.01532	25.01358
	Std. Deviation		5.419185	5.976726
Most Extreme Differences	Absolute		.106	.137
	Positive		.106	.106
	Negative		-.095	-.137
Kolmogorov-Smirnov Z			.671	.869
Asymp. Sig. (2-tailed)			.758	.438

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Data Olahan, 2015

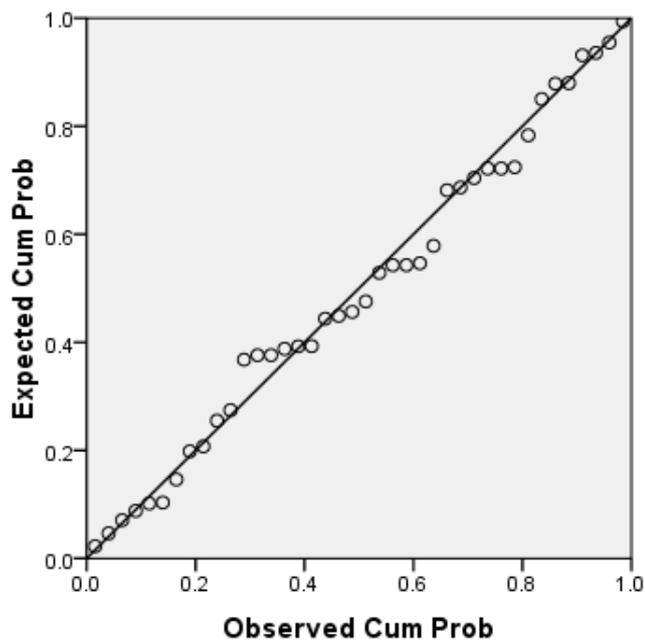
Berdasarkan tabel 8 menunjukkan nilai *Kolmogorov-Smirnov* memiliki tingkat signifikan berada di atas 5% (0,05). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data dalam variabel ini mengikuti distribusi normal.

Namun demikian dengan hanya melihat nilai *Kolmogorov-Smirnov* hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk jumlah sample yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat *Normal Probability Plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001). Hasil *Normal Probability Plot* untuk uji normalitas adalah sebagai berikut:

Gambar 3: Grafik Hasil Pengujian *Normal Probability Plot*

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Efektivitas pengendalian keuangan



Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dengan mengikuti dasar pengambilan keputusan di atas, maka disimpulkan bahwa data dalam model regresi ini memenuhi asumsi normalitas data.

4.1.5.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut

homoskedastisitas.

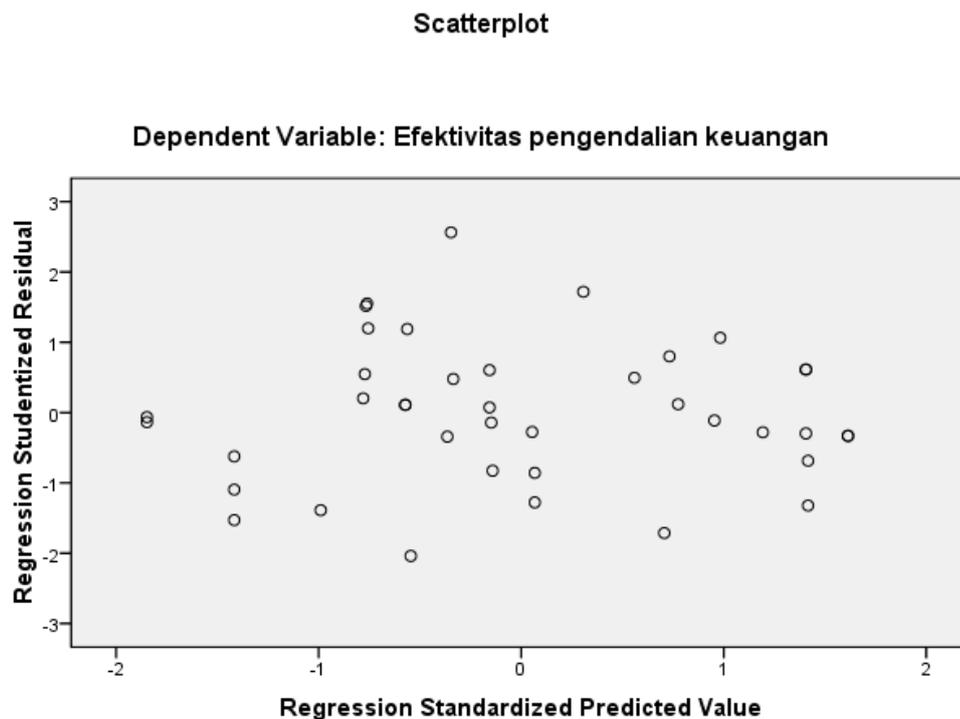
Deteksi heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi adanya penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas adalah dengan metode chart (*diagram scatterplot*), dengan dasar pemikiran bahwa:

- a. Jika ada pola tertentu yang beraturan pada titik-titik yang menyebar (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka terjadi heterokedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar ke atas dan di bawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 4 : Hasil Pengujian Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar 4 tersebut terlihat bahwa tidak ada pola yang jelas serta titik-titik yang ada menyebar ke atas dan di bawah 0, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

4.1.6 Analisis Regresi

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan syarat-syarat untuk memenuhi analisis regresi telah terpenuhi, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi. Model yang akan dibangun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Efektivitas pengendalian keuangan

X = anggaran berbasis kinerja

a = Nilai Konstanta harga Y jika X = 0

b= Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variable Y.

4.1.6.1 Hasil Analisis Regresi.

Setelah dilakukan pengujian asumsi klasik dan syarat-syarat untuk memenuhi analisis regresi telah terpenuhi, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi. Model regresi dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel anggaran berbasis kinerja (X), terhadap variabel dependen efektivitas pengendalian keuangan (Y).

Adapun hasil analisis regresi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9: Model Persamaan Regresi

Coefficients ^a			
Model		Unstandardized Coefficients	
		B	Std. Error
1	(Constant)	6.967	1.407
	Anggaran berbasis kinerja	1.002	.075

a. Dependent Variable: Efektivitas pengendalian keuangan

Sumber: Olah data, 2015

Berdasarkan tabel 9 maka diperoleh persamaan regresi untuk melihat pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian keuangan sebagai berikut:

$$Y = 6.967 + 1.002X$$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Nilai konstanta pada persamaan ini sebesar 6.967 menjelaskan nilai rata-rata efektivitas pengendalian keuangan pada saat anggaran berbasis kinerja konstan (tidak berubah) atau sama dengan nol adalah sebesar 6.967
2. Koefisien regresi untuk variabel x anggaran berbasis kinerja (bx) bertanda positif sebesar 1.002 menunjukkan perubahan efektivitas pengendalian keuangan (Y) jika anggaran berbasis kinerja meningkat sebesar satu satuan. Jadi jika skor anggaran berbasis kinerja (X) meningkat sebesar 1 (satu) satuan maka akan terjadi peningkatan efektivitas pengendalian keuangan (Y) sebesar 1.002. hal ini menunjukkan bahwa semakin baik anggaran berbasis kinerja maka efektivitas pengendalian keuangan akan semakin baik.
3. Nilai koefisien regresi menunjukkan arah positif yang berarti bahwa terdapat pengaruh yang positif anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian

4.1.6.2 Pengujian Hipotesis

Setelah diperoleh model persamaan regresi, maka langkah selanjutnya melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ditujukan untuk menguji ada tidaknya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji t. Hipotesis statistik yang akan diuji sebagai berikut:

$H_0: \rho_{yx1} = 0$ Penerapan anggaran berbasis kinerja tidak berpengaruh terhadap Pengendalian Keuangan daerah.

$H_1: \rho_{yx1} \neq 0$ Penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh terhadap Pengendalian Keuangan daerah.

Kriteria pengambilan keputusan dalam melakukan penerimaan dan penolakan setiap hipotesis dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} untuk masing-masing koefisien regresi. Apabila t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} , maka hipotesis nol (H_0) atau (H_1) ditolak, dan apabila t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} , maka H_1 atau diterima.
2. Cara yang kedua Selain kriteria perbandingan t_{hitung} dengan t_{tabel} , yaitu dengan menggunakan kriteria nilai *p value* (kekuatan koefisien regresi dalam menolak H_0). Jika *p value* < 0,05 maka H_0 ditolak dan apabila *p value* > 0,05 maka H_0 diterima.

Adapun hasil Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 10 berikut:

Tabel 10: Hasil Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6.967	1.407		4.953	.000
	Anggaran berbasis kinerja	1.002	.075	.908	13.382	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas pengendalian keuangan
Sumber: Olah data, 2015

Hasil analisis pada tabel 10 menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel anggaran berbasis kinerja adalah sebesar 13.382 Sedangkan nilai t_{tabel} pada tingkat signfikansi 5% dan derajat bebas $n-k-1=40-1-1= 38$ sebesar 1.685 Jika kedua nilai t ini dibandingkan maka nilai t_{hitung} masih lebih besar dibandingkan dengan nilai t_{tabel} sehingga H_0 ditolak. Selain itu apabila kita membandingkan nilai signifikan (P_{value}), maka dapat dilihat bahwa nilai P_{value} dari pengujian ini lebih kecil dari 0.05. Dengan kata lain pada tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo.

4.1.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk mengukur besarnya proporsi atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Setelah diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian keuangan maka langkah selanjutnya adalah menganalisis besar pengaruh yang ditimbulkan oleh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian keuangan pada pemerintah Kabupaten Gorontalo, untuk keperluan tersebut digunakan analisis koefisien determinasi.

Nilai koefisien determinasi merupakan suatu nilai yang besarnya berkisar antara 0% - 100%. Semakin besar nilai koefisien determinasi suatu model regresi menunjukkan bahwa pengaruh dari variabel bebas yang terdapat dalam model terhadap variabel tidak bebasnya juga semakin tinggi. Untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel:

Tabel 11: Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 ^a	.825	.820	2.533352

a. Predictors: (Constant), Anggaran berbasis kinerja

b. Dependent Variable: Efektivitas pengendalian keuangan

Sumber: Olah Data 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa besarnya koefisien determinasi atau angka *R Square* adalah sebesar 0.825. Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap efektivitas pengendalian keuangan pada pemerintah kabupaten Gorontalo diperoleh sebesar 82.5% dan sisanya sebesar 17.5% (100-82.5) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis regresi dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, penelitian ini membuktikan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo. Semakin baik penerapan anggaran berbasis kinerja maka efektivitas pengendalian keuangan yang dihasilkan oleh DPPKAD Kabupaten Gorontalo akan semakin baik. Angka R^2 atau Koefisien determinan dari hasil penelitian ini adalah sebesar 0.825 hal ini berarti 82.5% efektivitas pengendalian keuangan pada DPPKAD Kabupaten Gorontalo dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh penerapan anggaran berbasis kinerja.

Penganggaran merupakan rencana keuangan yang secara sistematis menunjukkan alokasi sumberdaya manusia, material dan sumberdaya lainnya. Berbagai variasi tentang sistem penganggaran pemerintah dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk guna pengembalian keuangan, rencana manajemen, prioritas dari pengguna dana dan pertanggungjawaban kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) diantaranya menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pelaksanaan penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektivitas dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Anggaran merupakan suatu kerja pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk uang (rupiah) selama masa periode tertentu. Anggaran tersebut digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran dimasa-masa yang akan datang. Seperti yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2009: 122) menjelaskan anggaran merupakan suatu alat pengendalian, anggaran sebagai alat pengendalian memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa adanya anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran.

Teori dari mardiasmo (2009) menjelaskan anggaran sebagai alat ukur kinerja pemerintah dapat digunakan sebagai alat pengendalian keuangan. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasiona atau kegiatan pemerintah. Sebagai alat pengendalian, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu anggaran digunakan untuk member inforasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah ekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Penganggaran berbasis kinerja menghubungkan pengeluaran anggaran dengan hasil yang akan dicapai (Kenis dalam Mardiasmo, 2004). Sedangkan Anthony dan Young (2003) menjelaskan pengendalian keuangan berhubungan dengan aktivitas pengeluaran. Sehingga itu dapat disimpulkan bahwa anggaran berbasis kinerja dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian keuangan.

Hasil penelitian ini membuktikan penelitian dari Penelitian Hindri Asmoko (2006) dalam hasil penelitiannya mengatakan variabel penganggaran berbasis kinerja berkorelasi positif dengan variabel Pengendalian Keuangan dan variabel penganggaran berbasis kinerja K berkorelasi positif dengan variabel efektivitas pengendalian kinerja sebesar.

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Rahmatullah (2009) yang membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif antara Penganggaran Berbasis Kinerja dan Kompetensi secara simultan terhadap Pengendalian Keuangan, hal yang sama juga dilakukan oleh Mohamad Aqoma (2011) Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja dan

pengendalian operasional berpengaruh positif terhadap efektivitas pengendalian keuangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan penerapan anggaran berbasis kinerja merupakan salah satu alat untuk melakukan efektivitas pengendalian keuangan. Dengan anggaran berbasis kinerja akan terlihat hubungan yang jelas antara *input*, *output* dan *outcome* yang akan mendukung terciptanya sistem pemerintahan yang baik. Dengan pendekatan kinerja akan terwujud tanggungjawab (*akuntability*) dan keterbukaan (*transparancy*) dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengendalian keuangan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Gorontalo sebesar 82.5%. Penerapan anggaran berbasis kinerja yang semakin baik maka akan dibarengi oleh efektivitas pengendalian keuangan yang baik juga, Dengan kata lain penerapan anggaran berbasis kinerja akan turut meningkatkan efektivitas pengendalian keuangan pada dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Gorontalo.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan saran kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo, perlunya peningkatan penerapan anggaran berbasis kinerja pada pemerintah, peningkatan anggaran berbasis kinerja dapat digunakan sebagai alat bagi pemerintah daerah untuk mencapai efektivitas pengendalian keuangan yang baik. Untuk penelitian terdahulu diharapkan dapat lebih memperdalam analisis mengenai hubungan antara penerapan berbasis kinerja dengan efektivitas pengendalian keuangan.